

IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI  
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Makhtum Yandi Abrory

125010107111187



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (1) PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG IRIGASI  
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten  
Lamongan)**

**IdentitasPenulis :**

- a. Nama : Makhtum Yandi Abrory**
- b. NIM : 125010107111187**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

Disetujui pada tanggal : 28 April 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr.ShintaHadiyantina, SH.,MH.  
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Adminitrasi Negara

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum  
NIP. 196008101986011002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI (Studi di Dinas  
Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan)**

**Oleh :**

**Makhtum Yandi Abrory**

**125010107111187**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. ShintaHadiyantina, SH.,MH  
NIP. 19770305 200912 2 001

KetuaBagian  
HukumAdminitrasi Negara

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. RachmadSafa'at, SH., M.Si.  
NIP. 19620805 198802 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur teramat dalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para pihak terkait lainnya maka skripsi ini tidak akan terwujud oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

- 1. BapakDr. RachmadSafa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**
- 2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama, atas segala bantuan dan kesabarannya.**
- 3. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH Dosen Pendamping Pendamping, atas bimbingan serta waktu yang di luangkan.**
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas segala ilmu yang diberikan kepada saya**
- 5. Pihak-Pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu**

Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya serta keridhoan-Nya kepada kita semua. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin bahwa skripsi ini telah selesai. Namun Penulis juga tetap menerima segala saran dan kritik yang membangun, yang di harapkan untuk kemajuan masa-masa mendatang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya oleh pembaca dan pemerintah Daerah KabupatenLamongan.

Malang, 10 April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Ringkasan .....	viii
Summary .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematikan Penelitian .....	14

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Otonomi Daerah .....	16
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	16
2. Prinsip Otonomi Daerah .....	19
3. Pemerintah Daerah .....	21
B. Kajian Implementasi Kebijakan Publik	
1. Teori Kebijakan Publik .....	25
2. Pengertian Implementasi .....	29
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik .....	31
C. Kajian Pengawasan dan Pengendalian Fugsi Irigasi	
1. Teori Pengawasan .....	38
2. Pengelolaan Irigasi .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Metode Pendekatan .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Memperoleh Data .....	47
F. Populasi dan Sampel .....	48
G. Teknik Pengolahan Data .....	49
H. Teknik Analisa Data .....	50
I. Definisi Operasional .....	51

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi .....	53
B. Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.14 Tahun 2007 Tentang Irigasi .....	73
C. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.14 Tahun 2007 Tentang Irigasi .....	105

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran .....	117

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	60
--------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Waduk dan Rawa .....	6
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Anggaran 2015 .....	107



## **RINGKASAN**

Makhtum Yandi Abrory, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2016, IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan), Lutfi Effendi, SH.,M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MH.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan irigasi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.14 tahun 2007 tentang Irigasi. Tema tersebut di latar belakanginya adanya penyelewengan fungsi Irigasi sebagai lahan pertanian di Kabupaten Lamongan sebagai lahan pertanian. Kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dianggap membiarkan adanya hal tersebut karena sampai saat ini masih banyak di jumpai. Dari hal itulah adanya pertentangan antara peraturan yang ada dengan kondisi sosial yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 14 tahun 2007 tentang Irigasi? (2) Apa faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 14 tahun 2007 tentang Irigasi dan apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Karya tulis ini menggunakan Metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis (*sociology legal research*). Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan. Adapun Data yang di peroleh baik data primer dan sekunder yang diperoleh penulis yaitu dengan cara pedoman wawancara, tabulasi data serta studi kepustakaan. Dari hasil tersebut akan di analisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran terhadap permasalahan yang akan diteliti dimana penulis sebagai instrument kunci.

Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi Yaitu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan secara preventif dan represif. Secara umum pengendalian dan pengawasan masih terfokus pada pengendalian banjir dan kegiatan fisik. Sedangkan terkait dengan pengendalian perilaku masyarakat masih lemah dalam hal penertiban. Hal itu disebabkan karena adanya faktor yang menghambat yaitu Sumber Kewenangan, Anggaran Daerah, Fasilitas, Sumber Daya Manusia, Perilaku Masyarakat. Dari beberapa hambatan tersebut, maka ada beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan antara lain mengajukan rekomendasi ke Pemerintah Pusat, pengalihan Tindakan, menggunakan fasilitas Pribadi, pegawai merangkap tugas, melakukan Sosialisasi seoptimal mungkin, membuat kebijakan secara teknis terhadap jaringan irigasi

## SUMMARY

Makhtum Yandi Abrory, Administrative Law, Faculty of Law, UniversitasBrawijaya, April 2016, **The Implementation of Article 38 Subsection (1) of Regulation of Lamongan District No. 14 Year 2007 about Irrigation (A Study in the Department of Public Work Irrigation of Lamongan District)**, Lutfi Effendi, SH, M.Hum, Dr. ShintaHadiyantina, SH, MH.

In this study, the researcher raised the issues related to the supervision and control in irrigation management as stated in Article 38 subsection (1) of Lamongan District Regulation No.14 year 2007 aboutirrigation. The topic is based on the misappropriation of irrigation for agriculture in Lamongan as agricultural land. This has already become a habit for the local community, and Lamongan District Government is considered letting this to happen since there are still many cases found to present. Starting from this matter the conflict between the existing regulations and the social conditions prevailing happened.

Based on the above statement, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of Article 38 subsection (1) of Lamongan District Regulation No.14 year 2007 aboutirrigation?; (2) What are the factors that hinder the implementation of Article 38 subsection (1) of Lamongan District Regulation No.14 year 2007 aboutirrigation and what is the solution to overcome these obstacles?

This study used empirical research method with sociology legal research approach. The research site wason the Department of Public Work Irrigation, District of Lamongan. Both primary and secondary data were obtained through interview, data tabulation, and literature study. The data were analyzed using descriptive qualitative technique. Descriptive qualitative is the presentation of research results with the aim to obtain an overview of the issues being investigated where the researcher become the key instrument.

The results of this study show that the implementation of Article 38 subsection (1) of Lamongan District Regulation No. 14 year 2007 aboutirrigationthat is enacted by the Department of Public Work Irrigation of the district of Lamongan is done by controlling and supervising in preventive and repressive way. In general, the control and supervision are still focused on flood control and physical activity. Meanwhile, controlling the behavior of society is still weak in terms of enforcement. It is due to the factors that hinder namely resource authority, local government budget, facilities, human resource, and society behavior. For some of the obstacles, there are several solutions conducted by the Department of Public Work Irrigation Lamongan, among others, making recommendations to the central government, doing diversion of action, using private facilities, having employees taking more tasks at the same time, performing socialization as optimally as possible, and formulating technical policy on the irrigation network.